



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF KHUSUS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Alexander Lay
2. Jabatan : STAF KHUSUS BIDANG HUKUM
3. NHK : 405597

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 18.040.485.000

1. Bangunan Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 5102 m2/315 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 1948 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 311.680.000
4. Tanah Seluas 12127 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.062.545.000
5. Tanah Seluas 3829 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.282.715.000
6. Tanah Seluas 2831 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 948.385.000
7. Tanah Seluas 1315 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 610.160.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
9. Bangunan Seluas 119 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.075.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 670.000.000

1. MOBIL, MITSHUBISI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000



2. MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	386.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	29.584.211.991
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.216.505.648
F. HARTA LAINNYA	Rp.	874.560.543
Sub Total	Rp.	61.772.313.182
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	61.772.313.182

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.